

kewajibannya sesuai dengan status dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Apa bila seseorang atau kelompok melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia telah menjalankan suatu peran.³²

Istilah peran biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam dunia teater dianalogikan dengan posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi dalam suatu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).³³

Aktor yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar yang memiliki beragam peran dalam kehidupan masyarakat di Dharmasraya. Pada masa Orde Baru, pewaris Kerajaan Koto Besar merupakan mitra pemerintah di tingkat lokal yang bertugas sebagai tangan kanan untuk melancarkan program pemerintah di wilayah tersebut, seperti pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi Sitiung. Pada masa pemerintahan desa, pewaris Kerajaan Koto Besar berperan sebagai pengurus Partai Golkar di tingkat lokal Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan pada masa otonomi daerah, pewaris Kerajaan Koto Besar memiliki peran ganda, yaitu sebagai masyarakat dan orang yang mengontrol pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Pewaris kerajaan adalah orang yang berhak menerima gelar warisan sebuah kerajaan, dalam hal ini adalah gelar kebesaran Kerajaan Koto Besar yang diturunkan secara matriaki berdasarkan garis keturunan ibu. Jane Drakard dalam A

³² Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 243.

³³ Edy Suhardono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

Kingdom of Words Language and Power in Sumatra, menjelaskan bahwa kerajaan dalam konteks adat Minangkabau merupakan sebuah pengecualian dalam tatanan sebuah kerajaan sebagaimana yang dipahami di Indonesia. Lembaga kerajaan disimbolkan sebagai kesatuan Minangkabau bukanlah lembaga yang aktif, tetapi lebih sebagai lembaga yang mengambil jalan pasif (tidak bersifat militer), atau kerajaan dalam ciptaan “kata-kata”. Kerabat kerajaan dihormati tetapi tidak mempunyai kuasa (*powerless*). Kerajaan di Minangkabau lebih merupakan wujud otonomi dan kebebasan untuk mengatur diri sendiri yang telah lama dijadikan ketetapan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.³⁴ Seperti halnya Kerajaan Koto Besar yang hanya ditandai dengan sebuah rumah *gadang* dan memiliki tanah ulayat yang luas sebagai bukti bahwa mereka berbeda dengan masyarakat di sekitarnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teori modalitas Pierre Bourdieu dalam menganalisisnya. Terkait dengan pemikirannya tentang modalitas, Bourdieu membagi modalitas menjadi lima bagian, yaitu: *social capital*, *economic capital*, *political capital*, *symbolic capital* dan *cultural capital* yang menjadi bagian dalam melegitimasi kepemilikan kekuasaan (*legitimate authority*). Pierre Bourdieu sebagai penggagas pemikiran teori modalitas menjelaskan kepemilikan modal sosial (*social capital*) merupakan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu atau kelompok untuk merebut dan mendapatkan kekuasaan dalam sebuah *space* yang disebut sebagai arena kekuasaan.³⁵

³⁴ Jane Drakard, *A Kingdom of Words Language and Power in Sumatra*, (New York: Oxford University Press, 1999).

³⁵ Alrizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 51.

Dalam konteks pewaris Kerajaan Koto Besar, modalitas yang mereka miliki pada hakikatnya dibagi dalam dua bentuk pemanfaatan, yaitu: modalitas yang dimanfaatkan oleh orang lain atau (pemerintah) dan modalitas yang dimanfaatkan oleh kelompok pewaris kerajaan. Pemanfaatan modalitas pewaris Kerajaan Koto Besar oleh pemerintah dapat dilihat pada masa pemerintahan Orde Baru, posisi pewaris hanyalah kaki tangan pemerintah di daerah, yang bertujuan untuk menguatkan dominasi kekuasaan pemerintah di wilayah tersebut. Pada masa otonomi daerah, modalitas yang mereka miliki barulah dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti Sutan Darman dan Aprisal Tuanku Rajo Dipati saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Dharmasraya pada tahun 2004, serta Sutan Riska saat bertarung sebagai kandidat bupati di Kabupaten Dharmasraya.

Modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap dalam membentuk hubungan dengan pihak lain. Modal sosial digunakan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan sesuatu nilai-nilai dan norma dengan membentuk suatu jaringan-jaringan kerjasama dengan pihak lain.³⁶ Kepemilikan modalitas yang dimiliki oleh kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar turut menjadi kekuatan mereka dalam membangun jaringan dengan kelompok sosial lainnya, sehingga bermuara pada legitimasi kekuasaan mereka di Kabupaten Dharmasraya.

³⁶ Witrianto, "Modal Sosial dan Pembangunan Manusia Melayu: Kasus Indonesia dan Malaysia" dalam Mohammad Redzuan Othman dkk (eds), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, (Kuala Lumpur: Arah Publications, 2009), hlm. 632.

1.6 Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Dalam penulisan sejarah, penggunaan metode dalam melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut menyebabkan sejarah menjadi sebuah ilmu yang ilmiah. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode sejarah sebagai alatnya. Louis Gottschalk dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan sejarah.³⁷

Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*.³⁸ Pada tahap heuristik penulis melakukan pengumpulan data, sumber, informasi dan jejak masa lampau baik bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer penulis dapatkan dari repro peninggalan Kerajaan Koto Besar, seperti *tambo*, stempel kerajaan dan angka yang tertulis pada makam raja-raja Koto Besar. Selanjutnya, sumber primer penulis dapatkan melalui metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan metode wawancara. Metode wawancara ini lebih penulis fokuskan kepada kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar, seperti Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Aprisal Tuanku Rajo Dipati, Suhatri, Puti Norma, Puti Yusrawati, Puti Teten Sumarni, serta pihak-pihak berkompeten yang terkait dengan tema penelitian ini.

Kegiatan pengumpulan data sekunder penulis lakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penggunaan studi kepustakaan penulis lakukan dengan mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta,

³⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32.

³⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau (PDKM) Padang Panjang, Perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Perpustakaan Museum Adityawarman Padang, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Sosiologi Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, serta buku-buku ilmiah yang telah dipublikasikan di media elektronik. Dalam penelitian pustaka juga ada sumber-sumber sekunder lain yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian, seperti surat kabar, artikel, jurnal, website dan lain-lain.

Setelah data atau sumber dikumpulkan maka penulis melakukan kritik terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber ini dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap material bahan sumber yang mesti dipertanyakan dengan pertanyaan apakah sumber yang didapat merupakan sumber asli. Kritik intern yaitu kritik yang diberikan atas kandungan informasi yang diberikan oleh sumber-sumber tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena kebenaran sebuah penelitian dan hasil yang diciptakan tergantung kepada kebenaran fakta atau sumber yang didapatkan.

Setelah langkah ini selesai maka penulis melakukan interpretasi data, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang akan digunakan dalam proses

historiografi. Tujuan dilakukannya interpretasi sumber adalah untuk menemukan fakta yang akurat untuk dijadikan sebagai fakta sejarah dan dipakai sebagai bahan sumber. Setelah melalui semua tahap tersebut, penulis menuliskan ke dalam bentuk tulisan cerita sejarah yang berkesinambungan dan bermakna.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengkaji tentang “Ragam Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya (1964-2016)”. Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang antara satu bab dengan bagian yang lainnya saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Untuk memperjelas apa yang akan diungkapkan, maka penulisan ini dibagi atas beberapa pokok kajian, yaitu:

Bab pertama adalah “Pendahuluan”. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa tema ini menarik untuk diteliti, batasan dan rumusan masalah yang menjadi pokok pikiran dalam penulisan, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan yang menjadi rujukan penulisan tesis ini, kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan, metode penelitian dan bahan sumber yang digunakan yang berpedoman pada metode dan sumber sejarah, serta sistematika penulisan untuk menggambarkan pembahasan yang akan diuraikan.

Bab kedua adalah “Monografi Daerah Koto Besar”. Pada bagian ini menjelaskan tentang asal-usul nama Koto Besar dan dinamika penyebutan identitas Koto Besar berdasarkan periode kekuasaan, letak geografis Koto Besar

berdasarkan gambaran permukaan bumi, potensi alam dan mata pencaharian sebagai sumber perekonomian masyarakat, gambaran administratif dalam beberapa periode kekuasaan, struktur sosial yang menggambarkan posisi pewaris kerajaan di tengah masyarakat, serta sosial budaya masyarakat Koto Besar yang meliputi tradisi pengangkatan anak (*bainduak*), tradisi ziarah adat, budaya perkawinan, bahasa dan dialektika Koto Besar, serta tradisi-tradisi yang telah hilang, seperti *bakaua*, *batoboh* dan tradisi membuat lomang sokuih, sebagai bentuk peninggalan nenek moyang Koto Besar masa lampau.

Bab ketiga adalah “Kerajaan Koto Besar di Masa Lampau”. Pada bagian ini menjelaskan tentang dinamika Kerajaan Koto Besar sejak terbentuknya hingga berakhirnya rezim Orde Lama. Masalah yang akan dibahas dalam bab ini meliputi kondisi Kerajaan Koto Besar pada masa kepemimpinan tradisional, yaitu: sejarah terbentuknya Kerajaan Koto Besar, daerah kekuasaan dan batas wilayah, raja-raja dan mekanisme suksesi kepemimpinan, serta struktur adat dan pemerintahan. Selanjutnya juga membahas tentang kondisi Kerajaan Koto Besar pada masa Hindia Belanda, Kerajaan Koto Besar pasca kemerdekaan, serta peninggalan Kerajaan Koto Besar.

Bab keempat adalah “Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar Pada Masa Orde Baru”. Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar di awal Orde Baru, peran pewaris Kerajaan Koto Besar dalam derap pembangunan daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, seperti pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi Sitiung. Dalam bab ini juga menguraikan tentang peran pewaris Kerajaan Koto Besar dalam dunia politik pada

masa Orde Baru, yaitu: pada masa pemerintahan desa dan kiprah pewaris Kerajaan Koto Besar dalam hegemoni politik Partai Golkar.

Bab kelima adalah “Pewaris Kerajaan Koto Besar dalam Konstelasi Politik Dharmasraya dan Kebangkitan Pasca Reformasi”. Pada bagian ini membahas tentang kondisi pewaris kerajaan Koto Besar di awal masa reformasi, pewaris Kerajaan Koto Besar dalam pemekaran daerah Kabupaten Dharmasraya, modalitas yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar dalam membangun kuasa simbol di Dharmasraya, yaitu modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), modal politik (*politic capital*), modal simbolik (*symbolic capital*) dan modal budaya (*cultural capital*), serta kiprah beberapa tokoh pewaris Kerajaan Koto Besar pasca reformasi, seperti Sutan Darman Tuanku Kerajaan, Aprisal Tuanku Rajo Dipati dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Bab keenam adalah “Kesimpulan”. Bab ini adalah bagian penutup dan merupakan kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini. Sebagai sebuah kesimpulan, maka bagian ini dapat merumuskan pokok pikiran dari tema penelitian yang dituliskan.